



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Jend Sudirman No.19 Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92611 Telp. (0482)2425381

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA**

KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2018-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018-2023, maka perlumembentuk tim Penyusunan Dokumen RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
27. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 68);
28. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44);
30. Keputusan Bupati Nomor 574 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Peyusunan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018-2019 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis OPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :
a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINJAI,**

A. IRWANSYAH RANI YUSUF, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan) di Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinja di Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEYUSUNAN DOKUMEN RENCAN
STRATEGIS (RENSTRA) OPDDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018-2023

**SUSUNAN TIM PEYUSUNAN DOKUMEN RENCAN STRATEGIS (RENSTRA)
OPDDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

Wakil Ketua :

1. Kepala Bidang Perhubungan Darat
2. Kepala Bidang Perhubungan Laut
3. Kepala Bidang Bina Teknik, Sarana dan Prasarana

Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan

Wakil Sekretaris : A. Rafiuddin, S.Sos

Anggota :

1. Jasman Djamaluddin, S.SIP
2. Abdul sanrang, S.Sos
3. Sahribul, S.Sos
4. Muhtar, SE
5. Muhammad Alwi, S.Sos
6. Ernawati Rahman, SE

Sekertariat :

1. A.Jusniati, S.Sos
2. Fitria Nasir
3. Wahyuddin, S.Sos
4. Rahayu

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINJAI,**

**A. IRWANSYHRANI YUSUF, S.STP.,
M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I